



## PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Arbie Gugus Wandira <sup>✉</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Desember 2012  
Disetujui Januari 2013  
Dipublikasikan Februari 2013

### Keywords:

**Dana Alokasi Umum;  
Dana Bagi Hasil; Dana  
Alokasi Khusus;**

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

### Abstract

*The purpose of this study was to determine whether there is influence revenue the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and the Revenue Sharing Fund of the Allocation of Capital Expenditure to the provincial government as Indonesia either simultaneously or partial. The population in this study is a Provincial Government of Indonesia consists of 33 Province in 2012. This study uses secondary data in the form of budget realization report a Provincial Government of Indonesia in 2012. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression t test, F test, and the coefficient of determination. The results showed that the negative direction General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and the Revenue Sharing Fund significant effect on capital spending. While the revenue did not significantly influence capital expenditure. revenue variables simultaneously, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and the Revenue Sharing Fund significant effect on capital spending. For local governments are expected to pay more attention to the proportion of General Allocation Fund is allocated to capital expenditure.*

© 2012 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: arbieguguswandira@yahoo.com

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pentingnya mengamati berapa proporsi gaji guru dalam Belanja Pegawai adalah karena selama ini banyak pihak yang menyoroti dan mengkritisi mengenai jumlah Belanja Pegawai yang dinilai terlalu besar dalam APBD. Banyak pihak menyampaikan bahwa hal ini mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk Belanja Modal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat (Dirjen Perimbangan Keuangan 2012). Melihat adanya kondisi Belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi Indonesia kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti perlu mengkaji ulang untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal" (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012).

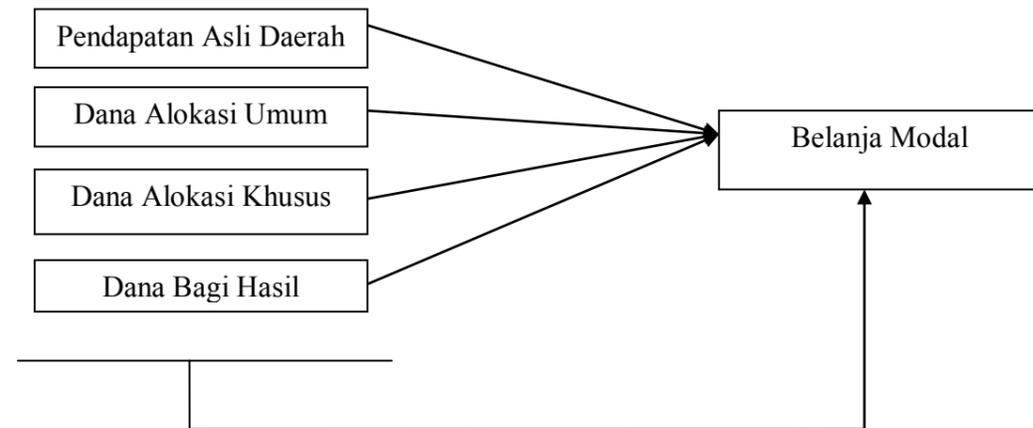
PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimal-

kan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani 2011). Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Hariyanto & Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal.

Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah*



Gambar 1 Kerangka Berfikir

*Pusat dan Pemerintah daerah*). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1. Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut :

- Ha<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia
- Ha<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia
- Ha<sub>3</sub> = Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia
- Ha<sub>4</sub> = Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia
- Ha<sub>5</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia

**METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, dimana obyek yang diamati berupa benda hidup maupun benda mati dan sifat-sifat yang ada dalam obyek tersebut dapat diukur atau diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012, yang terdiri dari data realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan data realisasi belanja modal yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemda. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu variabel pertama PAD (X1).

PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Variabel kedua yaitu DAU (X2). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Variabel ketiga yaitu DAK(X3). DAK adalah dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	33	93649	18685000	2187354.24	3699493.370
DAU	33	52638	1569782	819764.88	332884.921
DAK	33	0	106191	40479.15	17397.410
DBH	33	23983	8901550	796906.91	1679395.257
BM	33	147415	10944406	964098.55	1862679.440
Valid N (listwise)	33				

Sumber : Output SPSS (dalam jutaan rupiah)

juga prioritas nasional. Variabel keempat yaitu DBH(X4). DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel dependen (Y) yaitu belanja modal.

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja modal di pemerintahan Provinsi se-Indonesia tahun 2012 dimana data yang digunakan adalah Laporan realisasi APBD yang telah diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemda. Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu metode analisis deskriptif. Metode ini untuk menggambarkan variabel independen dan dependen secara keseluruhan. Sedangkan untuk menguji hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan uji F dan uji t. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda (Ghozali, 2005 dalam Maharani 2010) yang dilakukan dengan SPSS 16. Sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji normalitas dan uji linieritas karena untuk mengetahui apakah analisis regresi linier berganda layak digunakan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, dan DBH, sedangkan variabel dependennya adalah belanja modal. Berikut ini adalah uji statistik deskriptif:

Hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 33, dimana rata-rata jumlah PAD (X<sub>1</sub>) Pemerintah Provinsi se-Indonesia sebanyak Rp.2,1 Triliyun dengan jumlah PAD terendah Rp.93,6 Milyar dan PAD tertinggi Rp.18,6 Triliyun dengan standar devisiasi Rp.3,6 Triliyun dari rata-rata. PAD merupakan sumber penerimaan penting bagi daerah dalam jangka panjang yang berpengaruh besar terhadap penerimaan daerah. Rata-rata jumlah DAU (X<sub>2</sub>) sebanyak Rp.819,7

Milyar dengan jumlah DAU terendah Rp.52,6 Milyar dan jumlah DAU tertinggi Rp.1,5 Triliyun dengan Standar Devisiasi Rp.332,8 Milyar dari rata-rata. Rata-rata jumlah DAK (X<sub>3</sub>) sebanyak Rp.40,4 Milyar dengan jumlah DAK terendah Rp.0 dan jumlah DAK tertinggi Rp.106,1 Milyar dengan Standar Devisiasi Rp.17,3 Milyar dari rata-rata. Rata-rata jumlah DBH (X<sub>4</sub>) sebanyak Rp.796,9 Milyar dengan jumlah DBH terendah Rp.23,9 Milyar dan jumlah DBH tertinggi Rp.8,9 Triliyun dengan Standar Devisiasi Rp.1,6 Triliyun dari rata-rata. Rata-rata jumlah belanja modal (Y) sebanyak Rp.964 Milyar dengan jumlah belanja modal terendah Rp.147,4 Milyar dan jumlah belanja modal tertinggi Rp.10,9 Triliyun dengan Standar Devisiasi Rp.1,8 Triliyun dari rata-rata.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat analisis. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dibentuk dari variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* adalah 1,023 dan signifikansinya adalah 0,246 dan nilai diatas 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal. Untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan Uji Multikolonieritas Hasil Uji Multikolonieritas bahwa variabel independen yaitu DAU dan DAK mempunyai angka VIF dibawah angka 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 10% ( $\alpha = 0,10$ ), sedangkan variabel PAD dan DBH mempunyai nilai VIF diatas angka 10. Hal ini berarti terdapat persoalan multikolonieritas dalam penelitian ini, untuk memperbaiki model regresi jika terdapat persoalan multikolonieritas dapat dilakukan dengan cara melakukan transformasi logaritma agar setiap variabel yang dilakukan dapat memenuhi asumsi klasik.

Hasil Uji Multikolonieritas setelah Ln didapatkan variabel independen yaitu LnPAD, LnDAU, LnDAK, dan LnDBH mempunyai angka

Tabel 2 Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1931207.877	1485619.198		-1.300	.205
LnPAD	65613.275	42096.081	.157	1.559	.131
LnDAU	-393242.479	82068.522	-.440	-4.792	.000
LnDAK	432503.564	139959.898	.289	3.090	.005
LnDBH	196469.925	46091.605	.490	4.263	.000

a. Dependent Variable: LnBM

VIF dibawah angka 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 10% ( $\alpha = 0,10$ ). Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk variabel diatas tidak terdapat persoalan multikolonieritas. Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil uji Autokorelasi terdapat nilai Durbin Watson sebesar 1,887, dengan jumlah unit analisis 33, jumlah variabel bebas 4 nilai  $d_l = 1,1927$  dan  $d_u = 1,7298$  maka nilai DW 1,887 berada diantara -2 sampai +2 dan dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan adalah Uji *Scatterplot* dan Uji *Glesjer*. Hasil *Scatterplot* Model dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil uji *Glesjer* menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan LnPAD, LnDAU, LnDAK, dan LnDBH terhadap LnBM dengan melihat kekuatan hubungan antar LnBM dengan LnPAD, LnDAU, LnDAK, dan LnDBH. Persamaan regresi berganda didapatkan sebagai berikut:  $LnBM = -1931207,877 + 65613,275 LnPAD - 393242,479 LnDAU + 432503,564 LnDAK + 196469,925 LnDBH + e$ . Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel uji statistik t sebagai berikut :

Dari Tabel 2 dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$LnBM = -1931207,877 + 65613,275 LnPAD - 393242,479 LnDAU + 432503,564 LnDAK + 196469,925 LnDBH + e$$

Model regresi tersebut bermakna :

Nilai konstanta sebesar -1931207,877 artinya apabila nilai variabel LnPAD, LnDAU, LnDAK, dan LnDBH bernilai 0, maka anggaran belanja modal bernilai semakin berkurang. Variabel LnPAD menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan berpola positif sehingga semakin bertambah LnPAD maka semakin tinggi belanja modal. PAD berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 65613,275 artinya setiap pertambahan 1 Rupiah variabel PAD akan menaikkan belanja modal sebesar 65,6 Milyar. Variabel LnDAU menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan berpola negatif sehingga semakin bertambah LnDAU maka semakin rendah belanja modal. DAU berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar -393242,479 artinya setiap pertambahan 1 Rupiah variabel DAU akan menurunkan belanja modal sebesar -393,2 Milyar. Variabel LnDAK menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan berpola positif sehingga semakin bertambah LnDAK maka semakin tinggi belanja modal. DAK berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 432503,564 artinya setiap pertambahan 1 Rupiah variabel DAK akan menaikkan belanja modal sebesar 432,5 Milyar. Variabel LnDBH menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan berpola positif sehingga semakin bertambah LnDBH maka semakin tinggi belanja modal. DBH berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 196469,925 artinya setiap pertambahan

1 Rupiah variabel DBH akan menaikkan belanja modal sebesar 196,4 Milyar.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diperoleh nilai signifikansi dari LnPAD 0,131 > 0,05 sehingga PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan memiliki arah koefisien positif. Pada variabel LnDAU diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan memiliki arah koefisien negatif. Pada variabel LnDAK diperoleh nilai signifikansi 0,005 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal dan memiliki arah koefisien positif. Pada variabel LnDBH diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh terhadap belanja modal dan memiliki arah koefisien positif.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dapat dikarenakan ada nilai PAD yang rentangnya sangat jauh, yaitu antara Provinsi Maluku dan Provinsi DKI Jakarta, terbukti dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata PAD berjumlah Rp 2,1 Triliyun, dengan rincian nilai terendah Rp 93,6 Milyar terdapat di provinsi Maluku utara dan nilai tertinggi Rp 18,6 Triliyun terdapat di provinsi DKI Jakarta. Daerah dengan PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya pengalangan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Yovita (2011) mengatakan bahwa provinsi dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/ belanja operasional. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja

barang dan jasa dan belanja lainnya. Hubungan penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan dengan teori keagenan sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku opportunistik. Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki informasi keuangan yang lebih daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah negatif. Hal ini disebabkan DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam men-

**Tabel 3.** Uji Statistik F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.857E12	4	1.714E12	31.917	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.450E12	27	5.371E10		
	Total	8.307E12	31			

a. Predictors: (Constant), LnDBH, LnDAU, LnDAK, LnPAD

b. Dependent Variable: LnBM

Sumber : Output SPSS

dapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Uji Statistik F pada Tabel 3 digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji statistik F pada tabel diatas untuk menguji pengaruh LnPAD, LnDAU, LnDAK dan LnDBH yang mempunyai F-hitung sebesar 31.917 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan F-hitung sebesar 31.917 > F-tabel sebesar 2,69 yang artinya  $H_0$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

#### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya regresi linier berganda. Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,800. Hal ini berarti 80% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu LnPAD, LnDAU, LnDAK dan LnDBH, sedangkan 20% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

#### SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel DAU terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifi-

kan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DAU yang secara langsung bertanda negatif terhadap belanja modal, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal. Melihat pengaruh DAK dan DBH sangat signifikan terhadap belanja modal maka sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan anggaran DAK dan DBH yang di proporsikan ke anggaran belanja modal. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti penerimaan pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar 26-28 Juli 2007.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. "Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi". *Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1)*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hariato, David & Priyo Hari Adi. 2007. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita". *Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar 26-28 Juli 2007.

<http://www.djpk.depkeu.go.id>. Diakses pada 20 November 2012. Pukul 17.00

Maharani, Mayzestika. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah se Jawa Tengah". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prakosa, Kesit Bambang, 2004. "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118*.

Purwanto, Suharyadi. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Sianipar, Eva Septriani. 2011. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence from Pennsylvania Country Government in an Era of Retrenchment. *National Tax Journal*, Vol. 47 No. 4.

Syafitri, Irma. 2009. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sumatera Utara". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

----- No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Wahyuni dan Priyo Hari Adi. 2009. "Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali)". *National Conference UKWMS* Surabaya.

Yovita, Farah Marta. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)". *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.